

LARANGAN KAWIN BAGI SAMPU PISSE BAJA-BAJA DALAM MASYARAKAT ADAT LUWU DI KABUPATEN LUWU PROPINSI SULAWESI SELATAN

*Marital Prohibition over Sampu Pisse Baja-Baja in Luwu
Customary Society of Luwu Regency, South Sulawesi Province*

Hilaliah¹, H. Djoko Sukisno², dan H.A.A. Datja Patoppoi²

*Program Studi Magister Kenotariatan
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

This study aims to answer problems: sanction imposition on violation of stipulation of marital prohibition over *sampu pisse baja-baja* in Luwu customary society; impact on their relationship between them taking an oath; and impact on inheriting relationship for them violating the stipulation.

It was the sociologic juridical study, by doing field study to get primary data and literally study to get secondary data. This study was done in three villages in area of Luwu regency, South Sulawesi, those are, Suli village, Lempopacci village, and Botta village, which were chosen by purposive sampling. The study involved 15 respondents chosen by non random sampling with purposive sampling technique and 10 source people assumed to be competent and representative in giving information on customary law consisting of Head of Suli district, Head of KUA of Suli district, Head of villages and 5 customary prominent person consisting of 3 people from Suli village and 1 person from each Lempopacci and Botta villages.

The result of this study indicated that sanction imposition on violation of marital prohibition stipulation over *sampu pisse baja-baja* was in the form of course, not finding happiness in the world and the hereafter known as *Tang Cokkong Tang Colli*; force to end marriage occurred between two persons having *sampu pisse baja-baja* relationship; compulsory to slaughter *tedong Cimara* (Belang buffalo), which is *cera*; expelling out of the customary area. There was no inheriting relationship between them oath and inheriting relationship between parent and children would break if the children betray parent instruction by violating stipulation of marital prohibition over *sampu pisse baja-baja*.

Keywords: *marital prohibition – sanction – inheriting relationship.*

1. Jl. Toddopuli VIII No. 22, Makassar

2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

PENGANTAR

Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa merupakan negara yang terbentuk dari ribuan gugusan pulau. Kondisi geografis ini menyebabkan penduduk menyebar mendiami pulau-pulau tersebut, sehingga melahirkan banyak etnik dan suku bangsa dengan corak kebudayaan yang beragam pula. Keberagaman ini menjadi khazanah khas Bangsa Indonesia dalam membangun karakter dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional yang terbentuk dari perilaku dan adat istiadat lokal, yang diwariskan turun-temurun, merupakan refleksi kesatuan dalam keberagaman.

Berkaitan dengan hal tersebut Wignjodipoero (1984: 13), mengatakan bahwa:

Di negara Republik Indonesia, adat istiadat yang dimiliki oleh suku-suku yang ada adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu keIndonesiaan. Oleh karena itu, maka adat istiadat bangsa Indonesia dikatakan merupakan "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu juga yaitu dasar dan sifat keIndonesiaannya). Hal ini tidak mati, melainkan selalu berkembang senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa.

Seperti halnya dengan keanekaragaman budayanya, maka norma hukum dalam masyarakatnya pun bermacam-macam. Selain ketentuan hukum yang terdapat dalam perundangundangan, hukum agama, berlaku pula hukum adat yang kadang-kadang justru lebih kuat pengaruhnya dalam masyarakat, karena merupakan aturan tingkah laku keseharian masyarakat tersebut.

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum perkawinan. Sistem hukum ini merupakan bagian paling berpengaruh dalam masyarakat sebab perkawinan merupakan suatu hal penting karena mempunyai arti dan fungsi vital dalam kehidupan. Seperti halnya dengan sistem hukum yang lain, maka dalam sistem hukum perkawinan pun selain berdasarkan pada hukum positif perundang-undangan juga berdasarkan pada hukum agama dan hukum adat. Menurut Achmad Ali (1990: 47) hukum adat adalah: "adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, di mana hukum adat lebih berakar kepada tradisi dan sifatnya magis religius."

Suatu perkawinan pada dasarnya haruslah sesuai dengan ketentuan dalam masyarakat bersangkutan. Ketentuan ini selain diatur oleh hukum perundang-undangan, juga ditetapkan oleh hukum agama atau

kepercayaan dalam masyarakat tersebut. Faktor agama yang memegang peranan penting dalam lapangan perkawinan harus disertai dengan faktor sosial lainnya seperti adat istiadat masyarakat. Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warganegara Republik Indonesia, tetapi tidak berarti memandulkan pengaruh hukum adat, terbukti bahwa perkawinan dalam masyarakat masih sangat diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Menurut Syarifuddin (1987 : 3-4) bahwa: "suatu perkawinan menurut sistem hukum adat tidak dapat dipisahkan dengan alam pikiran yang melatarbelakangi hukum adat itu sendiri."

Salah satu hal yang penting dijadikan perhatian sebelum proses perkawinan dilaksanakan adalah ketentuan yang termuat dalam pasal 8, 9 dan 10 undang-undang tersebut tentang larangan kawin. Berkaitan dengan ketentuan tersebut masyarakat adat Luwu yang mendiami wilayah Kabupaten Luwu propinsi Sulawesi Selatan mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu keunikan adatnya yang masih dipertahankan yaitu penetapan larangan kawin bagi sepupu satu kali yang diangkat dari suatu sumpah orang tua, yang lebih dikenal dengan istilah *Sumpu pisse baja-baja*.

Sumpu pisse baja-baja adalah suatu hubungan yang timbul dari adanya sumpah yang diikrarkan oleh 2 orang bahwa untuk sekarang dan seterusnya anak keturunan mereka tanpa batas adalah bersepupu satu kali. Sumpah tersebut menyebabkan diantara keturunan mereka tanpa batas diharamkan untuk menikah satu sama lain.

Ketentuan ini sama sekali bertolak belakang dengan apa yang digariskan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 8, 9 dan 10 yang mengatur tentang larangan kawin. Pasal-pasal tersebut sama sekali tidak melarang untuk melaksanakan perkawinan antara 2 orang yang berhubungan sepupu demikian pula dalam Hukum Islam, sebagai agama yang mendominasi masyarakat adat tersebut, membenarkan perkawinan antara sepupu.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sanksi apakah yang dijatuhkan bagi pelanggaran atas ketentuan larangan kawin bagi sumpu pisse baja-baja?
2. Bagaimanakah dampak terhadap hubungan waris antara mereka yang bersumpah? dan bagaimanakah dampak terhadap hubungan waris bagi mereka yang telah melanggar ketentuan tersebut?

Hal-hal tersebut di atas perlu diteliti, karena menurut pengamatan penulis sampai saat ini belum pernah ada penelitian khusus yang mengkaji tentang larangan kawin bagi *sampu pisse baja-baja* dalam masyarakat adat Luwu di Kabupaten Propinsi Sulawesi Selatan. Penulisan ini dimaksudkan adalah untuk pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan hukum adat pada khususnya, yakni dalam bidang hukum perkawinan adat.

CARA PENELITIAN

Penelitian mengenai larangan kawin bagi *sampu pisse baja-baja* dalam masyarakat adat Luwu di kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, bersifat *sosiologis yuridis*, yakni menggambarkan secara objektif ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta menentukan frekwensi suatu gejala (Sumardjono, 1996:26). Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dengan tidak meninggalkan penelitian kepustakaan guna mempertajam penelitian lapangan.

Laporan hasil penelitian ini bersifat *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan adanya gambaran secara rinci dan sistematis tentang larangan kawin bagi *sampu pisse baja-baja* dalam masyarakat adat Luwu di kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan dengan dua macam cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan mempergunakan alat penelitian berupa studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan obyek studi dokumen menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
 - c. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
 - a. Literatur mengenai Hukum Perkawinan
 - b. Literatur mengenai Hukum Kewarisan
 - c. Literatur mengenai Hukum Adat
3. Bahan Hukum Tersier, Yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum Adat
 - b. Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - c. Terjemahan Al Quran

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer. Untuk memperoleh data primer, ditentukan wilayah dan subyek penelitian sebagai berikut :

1. Wilayah Penelitian.

Penelitian ini akan dilaksanakan di tiga desa dalam wilayah Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini dipilih secara *purposive* sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat di tiga desa ini masih sangat terikat dengan hukum adat mereka, khususnya tentang larangan kawin bagi *sampu pisse baja-baja*, sehingga diharapkan data-data yang diperoleh lebih akurat. Desa-desa tersebut terdiri atas:

- a. Desa Suli
- b. Desa Lempopacci
- c. Desa Botta

2. Subjek Penelitian

a. Responden

Responden penelitian ini sebanyak 18 orang yang bermukim di tiga desa yang telah ditentukan. Pemilihan ini ditetapkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

b. Narasumber

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden, maka dipilih juga beberapa orang sebagai narasumber yang penarikan sampelnya berdasarkan *purposive sampling*. Ditetapkan 5 orang pejabat yang dianggap berkompeten dan representatif dalam memberikan informasi tentang hukum adat masyarakat setempat. Keterangan tersebut diperkuat dengan menambah informasi dari 5 tokoh adat yang mewakili tiap-tiap desa lokasi penelitian. 3 orang dari desa Suli, 1 orang dari desa Lempopacci dan 1 orang dari desa Botta. Mereka terdiri dari:

1. Kepala Kantor Kecamatan Suli.
2. Kepala KUA Kecamatan Suli
3. Para kepala desa dari 3 desa lokasi penelitian.
4. Para tokoh adat yang mewakili 3 desa lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data primer, maka alat penelitian yang digunakan adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bentuk pedoman wawancara ini dibuat secara semi terstruktur yaitu suatu bentuk pedoman wawancara yang merupakan kombinasi antara pedoman terstruktur dan pedoman tidak terstruktur. Wawancara akan dimulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian dari pertanyaan tersebut diajukan lagi pertanyaan yang lebih spesifik sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap dan mendalam.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data hasil studi dokumen (bahan sekunder) dan data hasil penelitian lapangan (bahan primer). Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif karena data yang diperoleh bukan merupakan angka-angka tetapi hasil wawancara dan telaah dokumen yang digambarkan secara *deskriptif*. Data yang diperoleh diperiksa kembali tentang identitas responden, kelengkapan isi alat pengumpulan data dan memeriksa macam isi data. Selanjutnya data yang terkumpul diklasifikasikan sebagai data *kualitatif*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampu pisse baja-baja bermula dari ikrar sumpah yang diucapkan oleh dua orang untuk mengikat mereka dan keturunan mereka dalam suatu hubungan persaudaraan yang sangat dekat, sebagaimana layaknya persaudaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Peningkatan hubungan ini menyebabkan mereka dan keturunan mereka tidak boleh terikat dalam suatu perkawinan.

Hubungan *Sampu pisse baja-baja* pada dasarnya bermula dari rasa terima kasih dan kasih sayang yang tumbuh di antara orang-orang tersebut. Biasanya berawal dari keinginan untuk membalas budi atas suatu pertolongan yang diberikan oleh salah seorang dari mereka. Ketidakmampuan secara material membalas pertolongan itu, atau ketidakinginan pihak yang menolong untuk dinilai pertolongannya secara materi, maka mereka memilih untuk mengekalkan hubungan mereka dalam suatu ikatan keluarga dengan bentuk *massampu pisse baja-baja*. Masyarakat adat setempat menyebut Ikrar sumpah tersebut dengan istilah *sitanro kada*.

Beberapa sebab yang bisa membuat seseorang *sitanro kada* dengan yang lain, dapat berupa :

- a. Salah seorang dari mereka pernah mengidap penyakit yang cukup parah, kemudian diobati sampai sembuh oleh temannya tersebut.
- b. Salah seorang dari mereka pernah terbelit utang hingga tak sanggup lagi membayarnya, kemudian utang tersebut dilunasi oleh pihak yang satunya.
- c. Salah satu dari mereka pernah ditolong oleh yang lainnya dari suatu musibah atau bahaya yang besar, seperti dipukul atau diperkosa.
- d. Salah seorang pernah menumpang hidup dari yang lainnya.
- e. Jujur dan bertanggung jawab memegang suatu amanah.

Berdasarkan hasil wawancara (Agustus, 2003) dengan 3 orang yang pernah ber-*sitanro kada* dengan orang lain, ditemukan fakta bahwa 2

diantara mereka melakukan ikrar *bersampu pisse baja-baja* karena mereka pernah mengobati anak dari pihak yang satu. Satu diantaranya mengaku bahwa dia mengangkat ikrar tersebut dengan temannya karena dia pernah ditolong dari pengeroyokan atas dirinya. Adapun dari 15 responden yang merupakan keturunan dari orang *bersitanro kada*, 7 diantaranya mengetahui alasan orang tua mereka mengucapkan sumpah tersebut. 8 orang responden tidak tahu alasan yang mendasari hubungan *sampu pisse* mereka. Ketidaktahuan ini disebabkan karena mereka hanya mendapat pesan berantai dari orang tua bahwa mereka adalah *bersampu pisse baja-baja*.

Berdasarkan wawancara (Agustus, 2003) dengan ketujuh orang yang mengetahui dasar alasan adanya ikrar *sampu pisse baja-baja* orang tua mereka diketahui bahwa 4 orang karena orang tua mereka pernah disembuhkan dari penyakit yang parah oleh teman berikrarnya. 1 orang responden menyatakan alasan terjalannya hubungan sumpah *sampu pisse baja-baja* mereka karena mereka saling memegang amanah yang diberikan oleh pasangan sumpah mereka. 1 orang responden karena pernah menumpang hidup pada teman berikrarnya. 1 orang responden karena dibebaskan dari belitan utang oleh pihak yang satunya. Alasan utamanya menurut mereka adalah keinginan untuk saling mendekatkan keluarga mereka, melanggengkan hubungan tersebut secara tulus, tanpa disertai keinginan memperoleh balasan atau pamrih tertentu. Hal ini diwujudkan dengan tidak diperkenankannya keturunan mereka untuk terikat dalam perkawinan sehingga hubungan mereka seolah-olah hubungan kekeluargaan berdasarkan garis keturunan dan darah.

Sumpah *Massampu pisse baja-baja* yang berkonsekwensi adanya larangan kawin bagi mereka dan diantara setiap keturunan mereka ini, dapat diikrarkan oleh setiap orang, tidak ada batasan derajat atau jenis kelamin. Hasil wawancara dengan para responden, diperoleh keterangan bahwa masyarakat adat Luwu memilih untuk tetap mempertahankan hukum ini. Hal ini tergambar dari jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan pada para responden dan narasumber. 18 orang responden menyatakan bahwa hukum adat ini masih berlaku. Para tokoh adat sebagai narasumber, semuanya menyatakan bahwa hukum adat ini masih berlaku, walaupun telah terjadi pengurangan nilai. Artinya, hubungan *sampu pisse baja-baja* yang telah ada pantang untuk dihapuskan atau dilanggar, tetapi masyarakat sekarang sudah tidak ada lagi yang mengangkat sumpah ini. (wawancara Agustus, 2003).

Mengenai pantas tidaknya hukum adat ini dipertahankan, 17 orang responden memastikan bahwa hal ini harus tetap dipertahankan karena:

1. mereka mempercayai adanya konsekwensi atau reaksi adat berupa kutukan atau hukuman fisik yang akan menimpa jika ketentuan ini diabaikan.
2. mereka ini adalah salah satu alat pengikat silaturahmi yang telah dikenal sejak dahulu.

Hal senada diungkapkan pula oleh para tokoh adat dengan penekanan bahwa hukum tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan karena adanya kutukan yang dapat menimpa baik bagi para pelanggar ataupun masyarakat setempat secara keseluruhan. 1 orang responden menganggap bahwa hukum ini sudah tidak sepantasnya lagi dihidupkan dalam masyarakat mereka yang sudah dapat digolongkan dalam masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Apalagi menurut mereka, baik undang-undang ataupun hukum agama tidak ada yang mengatur hal serupa.

Drs. Annas Hud, Kepala Kantor KUA Kecamatan Suli mengatakan bahwa hukum ini sebenarnya tidak pantas lagi diberlakukan karena hubungan nasab dengan bentuk *sampu pisse baja-baja* dalam perwalian nikah belum diatur dalam suatu undang-undang munakahat (Wawancara, Agustus 2003).

Menurut keterangan para tokoh masyarakat, selain kutukan, sanksi berupa hukuman fisik pun dapat dijatuhkan kepada mereka yang melanggar ketentuan peradatan ini, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan tapi tidak mengetahui adanya hubungan *sampu pisse baja-baja* ini di antara keluarga mereka, maka perkawinan tersebut harus diakhiri. Apabila mereka keberatan, dan tetap menghendaki perkawinannya dipertahankan maka mereka harus membayar denda berupa memotong *tedong cimara* (kerbau belang) sebagai *cera* (tumbal). *Tedong cimara* dalam pandangan dan kepercayaan masyarakat setempat adalah binatang keramat yang memiliki nilai magis dan sakral, sehingga sering dipakai sebagai *cera* dalam pesta adat maupun ritual-ritual lain. Kerbau jenis ini sudah langka, sangat sulit ditemukan. Kalaupun ada, harganya sangatlah mahal, berbanding sepuluh dengan kerbau biasa. *Cera* ini merupakan suatu bentuk ritual yang dimaksudkan sebagai sebagai pencucian atau pembersihan diri dari kesalahan sehingga warga kampung setempat terhindar dari malapetaka dan kutukan. Menunaikan *cera* bagi mereka yang melanggar ketentuan adat ini merupakan suatu keharusan. Bagi pelanggar yang tidak mampu menunaikannya akan diusir dari daerah adat tersebut karena dianggap sebagai sumber kesialan bagi warga masyarakat lainnya dan ancaman terhadap ketentraman hidup di kampung tersebut.

Kepercayaan akan adanya bencana yang bakal menimpa akibat pelanggaran ketentuan adat ini malah lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dari ketakutan akan ancaman sanksi yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan setiap anggota masyarakat merasa perlu menjaga agar tidak terjadi perkawinan antara mereka yang *massampu pisse baja-baja* maupun keturunannya. Ketakutan akan kutukan dari Yang Maha Kuasa tersebut juga menyebabkan masyarakat sekarang lebih berhati-hati sebelum mengikatkan diri dalam ikrar sumpah itu. Menurut keterangan yang ditambahkan oleh para kepala desa dari desa lokasi penelitian, kekuatan bayangan akan adanya kutukan bila adat ini dilanggar dibuktikan dengan tidak adanya sanksi secara fisik seperti yang tersebut di atas tidak pernah dijatuhkan walaupun ada penetapannya (Wawancara, Agustus 2003)

Perkembangan zaman modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keberadaan hukum agama Islam, sedikit banyak membawa pengaruh terhadap tata nilai lama, termasuk persoalan *sampu pisse baja-baja*, tapi tidak membuat hukum adat ini hilang. Sebahagian masyarakat masih mempercayai nilai adat ini berguna untuk mempererat hubungan kekeluargaan dalam masyarakat dan selebihnya beranggapan bahwa adat ini tidak lagi perlu dilestarikan karena sudah tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat sekarang ini.

Keinginan untuk mempertahankan nilai adat ini, tidak terwariskan secara baik di kalangan generasi muda saat ini. Generasi sekarang sudah jarang mengangkat sumpah ini. Menurut para responden alasan utama mengapa sumpah ini tidak lagi sering diucapkan karena takut tidak dapat mempertanggungjawabkan sumpah tersebut. Hal tersebut dikarenakan beratnya beban untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka, sehingga ditakutkan anak-anak mereka menjalin hubungan dan tidak saling mengetahui bahwa mereka adalah *sampu pisse baja-baja* mengingat anak-anak bila telah dewasa seringkali pergi meninggalkan kampung.

Mengenai hubungan mewaris antara mereka yang telah berikrar *ma-Sampu pisse baja-baja*, Drs Annas Hud, kepala KUA Kecamatan Suli mengatakan bahwa tidak ada hubungan waris antara keduanya karena walaupun hubungan mereka dipererat dengan ikrar tersebut tetapi tetap bukanlah hubungan sedarah. Keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan dari para tokoh adat, bahwa ikrar sumpah *sampu pisse baja-baja* tidak menimbulkan adanya hubungan mewaris di antara mereka yang mengangkat sumpah karena hubungan kekeluargaan yang terbentuk di antara mereka hanya mengikat secara moral dan lebih bertujuan untuk mencegah keluarga mereka terlibat dalam ikatan

perkawinan. Sementara hubungan mewaris otomatis terbentuk hanya jika ada pertalian darah. Kalaupun ada peralihan kepemilikan barang dan harta antara satu sama lainnya, maka itu dalam bentuk hibah.

Pengucapan ikrar sumpah *sampu pisse baja-baja* oleh seseorang sejauh ini hanya mempunyai konsekwensi peradatan, baik bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya. Karena itulah, bagi anak keturunannya, ikrar tersebut memang menjadi suatu amanah orang tua yang harus dijaga, dan malah diperlakukan sebagai wasiat yang diwariskan secara terus menerus. Namun hubungan tersebut tidak memiliki konsekwensi terhadap harta dan peninggalan orang tua mereka.

Menurut Ahmad Sikki, tokoh masyarakat yang mewakili desa Lempopacci, persoalan pewarisan hanya muncul jika ahli waris dianggap melanggar adat *sampu pisse baja-baja*, menikah dengan pihak yang telah diikrarkan orang tuanya menjadi *sampu pisse baja-baja*. Menurut adat masyarakat Luwu, pelanggaran itu membuat sang ahli waris kehilangan hak terhadap harta peninggalan orang tuanya. Pandangan masyarakat adat Luwu pada anak yang melanggar tata nilai *sampu pisse baja-baja*, dianggap sudah menyalahi amanah orang tua, sehingga sang anak dianggap sudah tidak ada lagi, (wawancara, Agustus 2003)

Pemberian sanksi keras ini sebenarnya mencerminkan kekukuhan masyarakat Luwu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam keluarga. Setiap anggota keluarga diharuskan mengikuti tata nilai tersebut, sehingga pelanggaran terhadapnya mendapat konsekwensi yang tidak ringan.

KESIMPULAN

1. Sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan larangan kawin bagi *sampu pisse baja-baja* adalah berupa:
 - a. Kutukan tidak akan menemukan kabahagiaan dunia dan akhirat yang dikenal dengan istilah *Tang Cokkong Tang Colli*.
 - b. Pemaksaan untuk mengakhiri perkawinan yang telah terjadi antara dua orang yang berhubungan *sampu pisse baja-baja*.
 - c. Kewajiban memotong *tedong Cimara* (kerbau Belang) yang merupakan *cera* (tumbal).
 - d. Pengusiran keluar dari wilayah adat setempat.
2. Tidak ada hubungan kewarisan bagi mereka yang mengangkat sumpah.
3. Hubungan mewaris antara orang tua dan anak akan terputus apabila sang anak mengkhianati amanah orang tua berupa melakukan pelanggaran atas ketentuan larangan kawin bagi *sampu pisse baja-baja*, kecuali si pelanggar telah menjalani sanksi yang ditentukan.

Saran

1. Dengan semakin meningkatnya pemahaman agama masyarakat setempat, maka seyogyanya masyarakat adat Luwu mulai meninggalkan hukum adat ini atau dihapuskan sedikit demi sedikit. Karena tidak sesuai dengan hukum agama Islam, maupun hukum perundang-undangan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pembinaan agama dan penyuluhan hukum di masyarakat agar masyarakat dapat meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah SWT dan memperoleh pengetahuan tentang hukum yang berlaku di negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1990, *Mengembara Di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sjarifuddin Amier, 1987, *Diktat Hukum Perkawinan dan Harta Benda Perkawinan Menurut Sistem Hukum Adat*, Ujung pandang.
- Sumardjono, Maria S.W., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wignyodipuro Surojo, 1984, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.